Analysis Of The Effect Of Local Tax Revenue And Local Retribution On The Human Development Index Of Districts And Cities In Central Java Province (2017-2021 Period)

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017-2021)

Rizky Anika Sari^{1*}, Mahameru Rosy Rochmatullah²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

rizkysari0@gmail.com¹, mrn122@ums.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local tax revenue and local retribution on the human development index. The population in this study were 29 regencies and 6 cities in Central Java Province in the 2017-2021 period. This research method is quantitative research with secondary data. This research data was taken from the official website of the Central Java Provincial Statistics Agency and the official website of the DJPK of the Ministry of Finance. The analysis method in this study uses multiple linear regression. The results of this study indicate that both independent variables; local taxes and local retribution have a significant effect on the Human Development Index in districts and cities in Central Java.

Keywords : Regional Tax Revenue; Regional Retribution; Human Development Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Populasi pada penelitian ini yaitu 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2021. Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Data penelitian ini diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan website resmi DJPK Kemenkeu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen; pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Indeks Pembangunan Manusia

1. Pendahuluan

“Indonesia merupakan negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berbas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahimya otonomi daerah”.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, distrik diberi kekuasaan yang lebih penting untuk mengatur dan menangani keluarga mereka sendiri. Tujuan dari pelaksanaan kemandirian lokal termasuk mendekatkan organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak ke daerah setempat, membuatnya lebih mudah bagi masyarakat secara umum untuk menyaring dan mengontrol penggunaan aset yang diperoleh dari rencana Keuangan Teritorial (APBD), serta membuat persaingan yang kuat di antara distrik dan memberdayakan pembangunan (Rudi & Supjpto 2017).

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mungkin merupakan bagian utama dalam pelaksanaan yayasan lokal. APBD dilakukan dengan cara yang lugas, bertanggung jawab, menarik, dan produktif dengan tujuan yang cenderung bertanggung jawab secara sosial. Salah satu bagian APBD yang signifikan dalam upaya kemajuan provinsi adalah pendapatan daerah. Pendapatan provinsi terdiri dari biaya lingkungan, tuntutan lingkungan, keuntungan bisnis lokal, dan pembayaran teritorial. Pungutan lingkungan adalah komitmen yang diwajibkan yang dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan (Dewi & Sri Budhi, 2018).

“Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Peningkatan penerimaan pajak dapat mempengaruhi pembangunan di seluruh Indonesia”

Beberapa hal yang dilakukan oleh otoritas publik untuk meningkatkan bea terdekat adalah memiliki opsi untuk membuat metodologi pengumpulan pajak yang membuatnya lebih mudah bagi warga untuk membayar bea. Selain itu, perluasan biaya terdekat dapat dicapai dengan mengembangkan lebih lanjut administrasi publik yang diberikan oleh badan legislatif setempat. Perluasan pendapatan biaya terdekat akan mempengaruhi perluasan ekonomi serta pembangunan daerah (Saragih, 2018; Asteria 2015).

Retribusi daerah, salah satu bagian lain dari APBD, adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah lingkungan setelah menawarkan jenis bantuan tertentu kepada penghuni daerah/kota. Perbedaan yang wajar antara pungutan sekitar dan balas jasa lingkungan terletak pada timbal balik yang diberikan oleh pemerintah lingkungan. Sementara pungutan pajak tidak memberikan komitmen langsung, pembalasan lingkungan memberikan komitmen langsung dari pemerintah lingkungan kepada individu yang membayar retribusi tersebut (Irawan & Surya Asih, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu petunjuk yang dapat mengukur kemajuan kualitas SDM. IPM daerah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus telah berkembang secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Berikut ini adalah informasi mengenai peningkatan bantuan pemerintah daerah setempat yang dilihat dari Catatan Kemajuan Manusia (IPM) selama kurun waktu 2017-2021 di Kabupaten dan Kota Jawa Tengah.

Tabel 1. IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Banjarnegara	65.86	66.54	67.34	67.45	67.86
2	Kabupaten Banyumas	70.75	71.30	71.96	71.98	72.44
3	Kabupaten Batang	67.35	67.86	68.42	68.65	68.92
4	Kabupaten Blora	67.52	67.95	68.65	68.84	69.37
5	Kabupaten Boyolali	72.64	73.22	73.80	74.25	74.40
6	Kabupaten Brebes	64.86	65.68	66.12	66.11	66.32
7	Kabupaten Cilacap	68.90	69.56	69.98	69.95	70.42
8	Kabupaten Demak	70.41	71.26	71.87	72.22	72.57
9	Kabupaten Grobogan	68.87	69.32	69.86	69.87	70.41
10	Kabupaten Jepara	70.79	71.38	71.88	71.99	72.36
11	Kabupaten Karanganyar	75.22	75.54	75.89	75.86	75.99

12	Kabupaten Kebumen	68.29	68.80	69.60	69.81	70.05
13	Kabupaten Kendal	70.62	71.28	71.97	72.29	72.50
14	Kabupaten Klaten	74.25	74.79	75.29	75.56	76.12
15	Kabupaten Kudus	73.84	74.58	74.94	75.00	75.16
16	Kabupaten Magelang	68.39	69.11	69.87	69.87	70.12
17	Kabupaten Pati	70.12	70.71	71.35	71.77	72.28
18	Kabupaten Pekalongan	68.40	68.97	69.71	69.63	70.11
19	Kabupaten Pemalang	65.04	65.67	66.32	66.32	66.56
20	Kabupaten Purbalingga	67.72	68.41	68.99	68.97	69.15
21	Kabupaten Purworejo	71.31	71.87	72.50	72.68	72.98
22	Kabupaten Rembang	68.95	69.46	70.15	70.02	70.43
23	Kabupaten Semarang	73.20	73.61	74.14	74.10	74.24
24	Kabupaten Sragen	72.40	72.96	73.43	73.95	74.08
25	Kabupaten Sukoharjo	75.56	76.07	76.84	76.98	77.13
26	Kabupaten Tegal	66.44	67.33	68.24	68.39	68.79
27	Kabupaten Temanggung	68.34	68.83	69.56	69.57	69.88
28	Kabupaten Wonogiri	68.66	69.37	69.98	70.25	70.49
29	Kabupaten Wonosobo	66.89	67.81	68.27	68.22	68.43
30	Kota Magelang	77.84	78.31	78.80	78.99	79.43
31	Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77	74.98	75.40
32	Kota Salatiga	81.68	82.41	83.12	83.14	83.60
33	Kota Semarang	82.01	82.72	83.19	83.05	83.55
34	Kota Surakarta	80.85	81.46	81.86	82.21	82.62
35	Kota Tegal	73.95	74.44	74.93	75.07	75.52

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Jika dilihat dari Tabel 1, pemerintah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus mengalami perkembangan yang positif pada tahun 2017-2021. Kota Semarang merupakan kota dengan peningkatan IPM paling tinggi pada tahun 2017-2019, yaitu sebesar 82,01 pada tahun 2017, 82,72 pada tahun 2018, dan 83,19 pada tahun 2019. Pada tahun 2020-2021, peningkatan IPM yang paling menonjol terjadi di Kota Salatiga, yang meningkat menjadi 83,14 pada tahun 2020 dan 83,55 pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017-2021).”**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah

2. Tinjauan Pustaka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan daerah berhubungan dengan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Bantuan pemerintah daerah setempat dapat disurvei melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga perspektif dalam menentukan ukuran IPM untuk menunjukkan tingkat bantuan pemerintah daerah, khususnya pendidikan, kesejahteraan, dan upah (Irviani, Jatiningrum, dan Kasmi, 2019). *Human Development Index* (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai proporsi standar perubahan manusia. IPM digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara maju atau negara berkembang. IPM memperkirakan pencapaian peningkatan manusia dengan mempertimbangkan berbagai bagian kepuasan pribadi yang penting (Trianggara, Rahmawati, dan Yasin, 2016).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah terdekat, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) hingga tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk mendanai keluarga teritorial mereka (Mardiasmo, 2016).

“Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi dua bagian, yaitu:”

- a. Pajak provinsi, terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- b. Pajak kabupaten / kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2016), yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dsb.

“Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh daerah dan dikelompokkan dalam 3 golongan, antara lain:”

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang diberikan atau disampaikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan manfaat umum dan dapat diapresiasi oleh masyarakat atau elemen masyarakat. Macam-macam retribusi jasa umum terdiri dari:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan,
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
 6. Retribusi Pelayanan Pasar,
 7. Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor,
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan standar usaha yang pada dasarnya juga dapat diberikan oleh daerah yang bersifat rahasia. Macam-macam Retribusi Jasa Usaha terdiri dari
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Pakir
 6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggahan / Villa
 7. Retribusi Penyedotan Kakus
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian izin kepada orang atau badan yang diharapkan untuk pengarahannya, pembinaan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan aset normal, barang dagangan, kerangka kerja, kantor, atau kantor tertentu untuk menjaga kepentingan umum dan menyelamatkan iklim. Jenis-jenis retribusi izin yang spesifik terdiri dari
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Pendapatan daerah berhubungan dengan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Bantuan pemerintah daerah setempat dapat dievaluasi dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada tiga perspektif dalam menentukan ukuran IPM untuk menunjukkan tingkat bantuan pemerintah daerah, yaitu pelatihan, kesejahteraan, dan upah (Irviani, Jatiningrum, dan Kasmi, 2019).

Saragih (2018) memimpin sebuah tinjauan yang *An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index*. Hasil penelitiannya dari pemeriksaannya adalah 34 wilayah di Indonesia pada periode 2013-2016, pendapatan biaya lingkungan mempengaruhi catatan kemajuan manusia. Dengan mempertimbangkan efek dari eksplorasi masa lalu, spekulasi dalam tinjauan tersebut dapat diketahui sebagai berikut.

H_1 : Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Retribusi daerah yang merupakan angsuran untuk administrasi atau pemberian izin unik yang diberikan atau berpotensi diberikan oleh pemerintah lingkungan kepada orang/badan, diharapkan dapat membantu sumber pendanaan lingkungan dalam mengkoordinasikan perbaikan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan ekonomi dan bantuan pemerintah dari individu-individu di lingkungan tersebut.

Irawati, Prihastiwati, dan Fatimah (2020) dalam membedah dampak retribusi daerah, kemahalan terdekat, dan PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya retribusi daerah pada penelitian ini pada dasarnya berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah. Balas jasa teritorial yang penting untuk pembayaran lokal dapat bekerja pada bantuan pemerintah masyarakat di Jawa Tengah. Mengingat konsekuensi dari eksplorasi masa lalu, spekulasi dalam tinjauan ini dapat direncanakan sebagai berikut.

H₂: Terdapat pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sri Budhi (2018) mengenai pengujian dampak biaya lingkungan, tuntutan lingkungan terhadap perkembangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Palangkaraya adalah bahwa biaya lingkungan dan tuntutan lingkungan secara signifikan mempengaruhi perkembangan moneter kewilayahan untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat. Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan sebelumnya, spekulasi dalam tinjauan ini dapat diketahui sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Metode Penelitian

Data Penelitian

Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah data sekunder. data sekunder diperoleh dari catatan yang sebenarnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK dari Dinas Pelayanan Uang. Informasi yang digunakan adalah informasi kuantitatif dalam rentang waktu 2017-2021. Studi ini melibatkan populasi seluruh daerah dan komunitas perkotaan di kota di Jawa Tengah berjumlah 29 daerah dan 6 kota.

a. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Informasi IPM Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari informasi BPS yang diperkenalkan dalam bentuk angka, sedangkan faktor bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan penilaian sekitar dan pembalasan lingkungan. Informasi mengenai pendapatan perkapita dan retribusi daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wilayah Focal Jawa yang diperoleh dari situs resmi BPS Jawa Tengah dan situs BPS www.djpk.kemenkeu.go.id.

b. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan berbagai regresi linier berganda dalam pengujian teorinya. Pengujian ini untuk mengantisipasi kekuatan dampak dari faktor bebas terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- a = Nilai Konstanta
- b_1 = Koefisien regresi Pajak Daerah
- b_2 = Koefisiendi regresi Retribusi Daerah
- X_1 = Variabel Pajak Daerah
- X_2 = Variabel Retribusi Daerah
- Y = Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- e = eror (item)

c. Teknik Analisis

Uji t

Uji t diarahkan untuk memutuskan dampak dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah terhadap Peningkatan Manusia (IPM) di daerah-daerah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus. Uji t diselesaikan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan keadaan yang menyertainya:

1. Formulasi Ho dan Ha
 - a. Ho : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
 - b. Ha : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
2. Menentukan nilai t hitung dengan tingkat kepastian 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan tingkat peluang, $df = n-2$ = penting untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapata Asli Daerah.
3. Menarik kesimpulan
Ho ditolak dan Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel} > Sig\ t < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh bahwa ada dampak pendapatan biaya lingkungan dan pembalasan di dekatnya agak pada Catatan Peningkatan Manusia (IPM) di rezim dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus Ho diterima dan Ha ditolak dengan asumsi $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$ (0,05) benar-benar bermaksud bahwa tidak ada dampak pendapatan biaya lingkungan dan pembalasan di dekatnya agak pada Catatan Peningkatan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Uji F

Pengujian ini diarahkan untuk memutuskan apakah variabel Pajak Daerah dan Retribusi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan keadaan yang menyertainya; Langkah-langkah pengujian hipotesis:

1. Formulasi Ho dan Ha
 - a. Ho : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
 - b. Ha : Ada pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
2. Menentukan nilai F tabel dengan tingkat kepastian 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan tingkat signifikansi $df_1 = k$, $k =$ Jumlah faktor bebas, $df_2 = n-k-1$ selesai untuk memutuskan apakah ada pengaruh yang sangat besar dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Menarik Kesimpulan
 - a. Ho ditolak Ha diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
 - b. Ho diterima dan Ha ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Koefisien Determinan (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel terikat, penting untuk mengetahui koefisien determinasi atau kepastian dari harga R^2 dari 0-1, semakin mendekati 1 maka harga R^2 menyiratkan bahwa semakin penting faktor bebas dapat menjelaskan variabel dependen. Pemeriksaan harga R-square (R^2) digunakan untuk memutuskan sejauh mana variabel independen (X) dapat menjelaskan hubungan perubahan dalam variabel dependen (Y). Sifat-sifat R-square sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor otonom di mana semakin banyak faktor bebas, semakin besar nilai R-square.

4. Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diolah didapatkan deskripsi statistic yang dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2. Descriptive Statistic

Descriptive Statistic			
	Mean	Std. Deviation	N
IPM	1,8531	,02176	175
Pajak Daerah	11,0219	,28484	175
Retribusi Daerah	10,2827	,21337	175

Sumber: data yang diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, N menyatakan berapa banyak informasi substansial. Jumlah informasi substansial adalah 175. Mean atau Rata-rata atau insentif normal untuk IPM adalah 1,8531; dan Retribusi Daerah 11,0219; Retribusi Daerah Terdekat adalah 10,2827. Standar deviasi menunjukkan deviasi standar yang merupakan dasar dari fluktuasi. Efek dari penanganan informasi

menunjukkan nilai standar deviasi untuk IPM sebesar 0,02176; Pajak Daerah sebesar 0,28484; dan Retribusi Daerah sebesar 0,21337.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi yang ditemukan apakah ada korelasi antar variabel bebas. Berikut adalah hasil output SPSS.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Daerah	,511	1,959
Retribusi Daerah	,511	1,959

Sumber: data yang diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil olah data diatas, terlihat bahwa kedua variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor bebas memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Jadi kesimpulannya adalah ketiga faktor tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar faktor bebas pada model regresi

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variasi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Berikut adalah hasil data output SPSS.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,058	,038		1,552	,123
1 Pajak Daerah	,004	,004	,110	1,003	,317
Retribusi Daerah	-,009	,005	-,185	-1,686	,094

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023

Dasar pengambilan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser adalah dengan mengasumsikan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada efek samping heteroskedastisitas pada model regresi, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan informasi di atas, faktor tugas terdekat dan faktor balas dendam tetangga memiliki nilai kepentingan sebesar 0,317 dan 0,094, yang mengimplikasikan bahwa kedua faktor tersebut terbebas dari efek samping heteroskedastisitas.

Uji Statistik t

Tabel 5. Uji Statistik t

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,469	,061		23,958	,000
1 Pajak Daerah	,067	,006	,876	10,815	,000
Retribusi Daerah	-,034	,008	-,337	-4,166	,000

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023

Uji statistik t berencana untuk menguraikan koefisien batas dari variabel independen. Variabel tersebut seharusnya penting bagi variabel dependen dengan asumsi nilai signifikansi di bawah 0,05. Berdasarkan tabel di atas, kedua variabel independe memiliki nilai kepentingan terhadap variabel terikat. Nilai dari variabel biaya lingkungan adalah 0.000 dan nilai dari variabel retribusi terdekat adalah 0.000.

Uji Statistik F

Tabel 6. Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,036	2	,018	69,810	,000 ^b
1 Residual	,041	159	,000		
Total	,076	161			

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang diingit untuk model mempengaruhi variabel dependen. Pengujian spekulasi ini sering disebut pengujian makna umum garis regresi yang perlu menguji apakah variabel dependen secara langsung berhubungan dengan variabel independen.

Berdasarkan tabel di atas, yang dapat dilihat dari tabel ANOVA atau uji F, nilai F yang ditentukan adalah 69,810 dengan propabilitas 0,000. Dengan demikian, kemungkinannya lebih kecil dari 0,05, cenderung dianggap bahwa koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa faktor bebas tugas terdekat dan balas dendam lingkungan pada saat yang sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel bebas. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi R Square.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,684 ^a	,468	,461	,01598

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor bebas, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki pengaruh sebesar 46,1% terhadap Rekor Kemajuan Manusia di Jawa Fokus pada tahun 2017-2021. Sisa 53,9% merupakan elemen-elemen lain di luar faktor yang diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil penelitian ini pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan hubungan searah antara penerimaan pajak daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dapat menjadi pendorong peningkatan standar Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi atau semakin naik nilai Indeks Pembangunan Manusia maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Eksplorasi ini juga sesuai dengan penelitian Saragih, (2018) bahwa

pemerintah yang layak dalam melaksanakan perubahan tugas teritorial dapat meningkatkan penguatan pendapatan biaya. Peningkatan ini dapat meningkatkan pendapatan biaya untuk mendukung pergantian acara lokal dan bantuan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil penelitian ini penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah selama tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan hubungan searah antara retribusi daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penelitian ini selaras dengan penelitian Irawati, Prihastiwi, & Fatimah (2020) hasil pengujian terhadap dampak retribusi lingkungan, retribusi lingkungan, dan PDRB terhadap bantuan pemerintah daerah adalah retribusi lingkungan dalam penelitian ini pada dasarnya berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah. Retribusi lingkungan yang penting bagi pendapatan sekitar dapat berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah di Jawa Timur.

3. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil penelitian ini kedua variabel bebas yakni pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat dianggap bahwa dua variabel independen; biaya terdekat dan retribusi daerah berpengaruh mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pemerintah yang kuat dalam melaksanakan perpajakan daerah di sekitar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan ini dapat meningkatkan pendapatan biaya untuk mendukung pergantian acara provinsi dan bantuan pemerintah.

Penelitian ini hanya dapat menjelaskan kondisi khusus di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun yaitu periode 2017-2021. Variabel independen yang digunakan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah hanya mampu menjelaskan 46,1% terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Selebihnya 53,9% merupakan faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

Saran yang diberikan untuk eksplorasi tambahan adalah dengan memanfaatkan faktor-faktor otonom lain yang berhubungan dengan penelitian terkait. Penelitian ini hanya menyoroti wilayah/kota di Jawa Fokus sehingga tidak dapat disimpulkan untuk wilayah lain.

Daftar Pustaka

- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Irviani, R., Jatiningrum, C., & Kasmir, K. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925>
- Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).

- Saragih, A. H. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, 14(2), 197–211. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.21595>
- Badan Pusat statistik. 2017. Berbagai tahun. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Trianggara, N., Rahmawati, R., & Yasin, H. (2016). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Spatial Panel Fixed Effect (Studi Kasus: Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah 2008 - 2013). *Jurnal Gaussian*, 5(1), 173–182.